

RENCANA PENGELOLAAN (MANAJEMEN PLAN) PBPH PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA



PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

DITERBITKAN OLEH : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK. 918/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021
TANGGAL : 13 OKTOBER 2021
LUAS : ± 38.695 HA
KPH : BACAN
KABUPATEN : KAB. HALMAHERA SELATAN
PROVINSI : MALUKU UTARA

TAHUN 2026

**RENCANA PENGELOLAAN & PEMANFAATAN HASIL HUTAN
PBPH PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA
PERIODE TAHUN 2017 - 2026**

KATA PENGANTAR

Dokumen Manajemen Plan (Rencana Pengelolaan) ini merupakan Rencana Pengelolaan Unit Manajemen PT. Wijaya Kencana Indonesia (PT. WKI), untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2017 – 2026, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Unit Manajemen yang memuat : Kebijakan (Visi dan Misi) dan Tujuan Unit Manajemen, Perencanaan Pengelolaan Hutan (Aspek Kelestarian Produksi dan Aspek Kelestarian Lingkungan/Ekologi) serta Perencanaan Pengelolaan Sosial (Ketenagakerjaan dan kemasyarakatan), serta komprehensif untuk memenuhi persyaratan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berdasarkan persyaratan/standar FSC dan Kementerian Kehutanan.

Dokumen Rencana Pengelolaan disusun merujuk pada dokumen :

1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT. Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2017 s.d 2026, yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024.
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) , RKL dan RPL Tahun 2015.
3. Laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) PT. WKI tahun 2025.
4. Laporan PRA (Participatory Rural Appraisal), Survei Sosial Desa Kelo, Desa Sosepe dan Desa Sum, PT WKI Tahun 2025.
5. Laporan SIA (Sosial Impact Assesment), Laporan Penilaian Dampak Sosial PT. WKI, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara, Tahun 2025.

Demikian Laporan Manajemen Plan ini dibuat, sebagai Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Wijaya Kencana Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan dokumen ini.



Ternate, Februari 2026

PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA

Edi Triono, S. Hut
Direktur

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia mendapat kepercayaan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016, tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA atas Areal Hutan Produksi seluas $\pm$ 38.695 Ha di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, untuk jangka waktu 45 tahun terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016 dan berakhir tanggal 17 Oktober 2061.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.918/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021, menyangkut nomenklatur PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (PBPH).

Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia senantiasa berupaya memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan Hutan Lestari dalam Upaya mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung oleh rencana kerja yang baik yang disusun berdasarkan data yang cukup dan akurat melalui Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).

Rencana pengelolaan hutan ini mencakup seluruh kegiatan rencana yang meliputi rencana penataan batas, penataan hutan, ITSP, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), penebangan, pengadaan bibit, bina hutan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Kelola social, perlindungan dan pengamanan hutan, penelitian dan pengembangan, rencana pengelolaan dan pemantauan hutan bernilai konservasi tinggi (HBKT), dan seluruh kegiatan produksi dengan *Teknik Reduced Impact Logging (RIL)*.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan merupakan rancangan rencana pengelolaan (*managemen plan*) unit manajemen PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia dalam mengelola pemanfaatan hasil hutan alam produksi secara lestari (jangka Panjang) dengan memperhatikan kelestarian usaha dan keseimbangan lingkungan, kesejahteraan karyawan, social ekonomi dan budaya Masyarakat setempat sehingga operasionalisasi pemanfaatan hutan tahunan di lapangan dapat dilakukan secara rasional terukur sesuai dengan kemampuan regenerative alami maupun buatan hutan areal PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia.

Rancangan rencana pengelolaan ini juga merupakan bahan informasi untuk stakeholders terkait seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Kencana Indonesia selama periode 2017 – 2026. Dalam mengelola hutan PT. Wijaya Kencana Indonesia memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

III. VISI DAN MISI

Visi Perusahaan adalah Menjadi Perusahaan PBPH Terkemuka dengan mengedepankan profesionalisme usaha, kelestarian hutan serta penerapan teknologi yang sesuai, guna diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi Perusahaan, karyawan maupun Masyarakat disekitar hutan.

Misi Perusahaan :

1. Meningkatkan dan mengembangkan unit usaha dibidang kehutanan secara optimal yang berbasis pada kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan.
2. Mengelola unit usaha kehutanan (PBPH-HA) secara professional guna meningkatkan efisiensi dan pendapatan.
3. Melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) sehingga mendapatkan sertifikat PHPL.
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar hutan secara proporsional.
5. Berperan serta dalam meningkatkan pembangunan perekonomian daerah dan nasional.

BAB II KONDISI UMUM

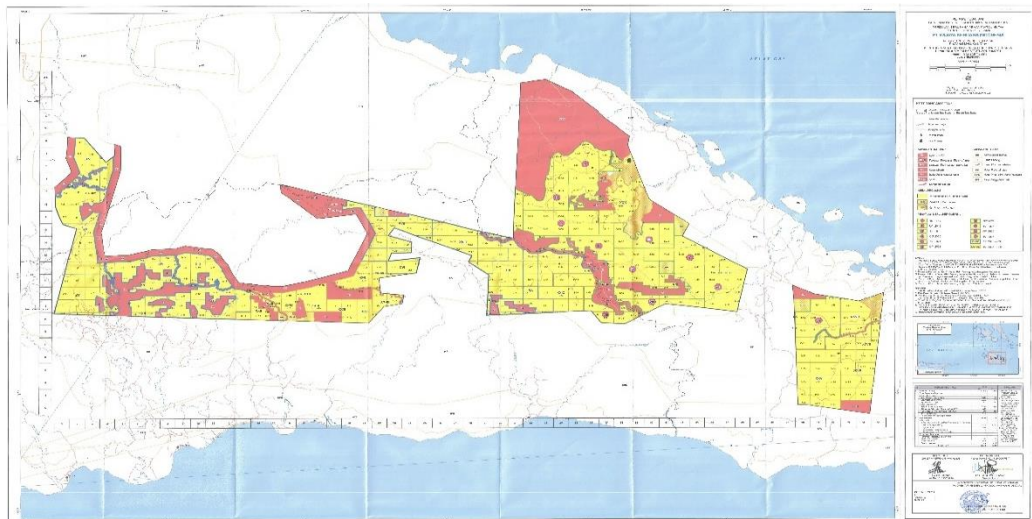
I. KONDISI UMUM PERUSAHAAN

1.1. Legalitas, Letak dan Luas

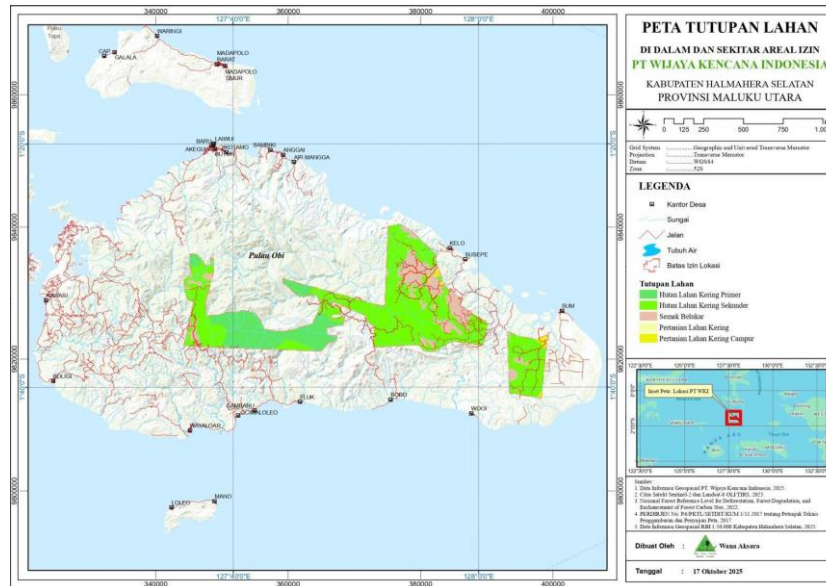
Nama PBPH	: PT. Wijaya Kencana Indonesia
No. SK	: SK. 918/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021
Tanggal	: 13 Oktober 2021
Luas	: ± 38.695 Ha
KPH	: Bacan
Kabupaten	: Halmahera Selatan
Provinsi	: Maluku Utara
Jangka Izin	: 18 Oktober 2017 s.d 17 Oktober 2061

1.2. Letak Geografis dan Batas Administratif

Letak Geografis	: 127° 36' 00,26" - 128° 05' 36,19" Bujur Timur 1° 26' 37,34" - 1° 40' 53,26" Lintang
DAS/Sub DAS	: DAS Kawasi dan DAS Wooi
Batas Areal	:
• Sebelah Utara	: Hutan Negara (HPK)
• Sebelah Selatan	: Hutan Negara (HP), PBPH PT. Poleko Yubarsons
• Sebelah Timur	: Hutan Negara (HPK), dan PBPH PT. Telaga Bakti Persada
• Sebelah Barat	: PBPH PT. Telaga Bakti Persada



Gambar 1. Peta Rencana Kerja PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia



Gambar 2. Peta Tutupan Lahan PT. WKI

1.3. Keadaan Hutan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan

Tabel 1. Keadaan Hutan Berdasarkan Peta Kawasan

No.	Perkembangan Areal Kerja PBPH	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)			Jumlah
		HP	HPT	Tubuh Air	
1	Posisi Awal	22.604	17.812	84	40.500
	- Surat Kep. BKPM No. 31/S-IUPHHK HA/PMDN/2015, Tgl. 23 Juli 2015				
	- Keputusan Kep. BLH Prov. Maluku Utara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Prov. Maluku Utara Nomor : 07/KEP-KA-BLH-MU/11/2015, Tgl. 9 Nov 2015.				
	- Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 Tg. 14 Desember 2015				
2	Perubahan	17.148	21.547	-	38.695
	- Keputusan Kep. BKPM Nomor : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tgl. 18 Okt 2016				
3	Posisi Terakhir (sekarang)	17.147	21.548		38.695
	Kep. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.918/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021, Tgl. 18 Oktober 2021				

1.4. Penataan Areal Kerja PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia

Tabel 2. Keadaan Hutan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan

No.	Penataan Areal Kerja	Perubahan ke-2 RKUPH 2017-2026	
		(Ha)	(%)
1	KAWASAN LINDUNG		
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan		
a.	Pemulihan Lingkungan		
1)	Buffer Zone Hutan Lindung	1.943	5,02
2)	Kawasan Lereng .> 40%	3.233	8,36
3)	Sempada Sungai	801	2,07
b.	Perlindungan Kehati		
1)	Perlindungan Areal Karst	3.792	9,80
2)	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	462	1,19
3)	Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	370	0,96
4)	Kebun Benih (KB)	544	1,41
c.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-
	JUMLAH KAWASAN LINDUNG	11.145	28,80
2	AREAL PRODUKSI		
a.	Swakelola		
	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam)		
1)	Blok Tebangan (TPTI)	26.185	67,67
2)	Calon PUP	508	1,31
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan		
1)	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-
b.	Kemitraan Kehutanan		
	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu		
1)	Tanaman Cengkeh	406	1,05
2)	Tanaman Pala	405	1,05
c.	Sarana Prasarana	46	0,12
	JUMLAH AREAL PRODUKSI	27.550	71,20
JUMLAH 1 + 2		38.695	100,00

1.5. Realisasi Pemanenan Periode (2020-2025)

Tabel 3. Rencana dan Realisasi Produksi Tahun 2020 - 2025

No.	Tahun	Rencana			Realisasi	Persen (%)	Keterangan
		Luas (Ha)	Volume (M ³)	Luas (Ha)	Volume (M ³)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2020	1.930,00	49.600,62	1.115,00	24.023,43	48,43	Tidak Ada RKT Tahap I (26,15 %) Tahap II CO Th. 2024 RKT Tahun 2025
2	2021	1.931,00	58.568,94	-	-	-	
3	2022	1.858,00	43.793,82	434,00	9.341,12	21,33	
4	2023	-	-	-	-	-	
5	2024	1.179,00	10.201,77	361,00	10.198,33	99,97	

No.	Tahun	Rencana			Realisasi	Persen	Keterangan
		Luas (Ha)	Volume (M ³)	Luas (Ha)	Volume (M ³)	(%)	
6	2024	1.179,00	34.655,18	361,40	10.660,12	30,76	
7	2025	501,00	13.468,01	453,50	12.459,72	92,51	
8	2025	1.308,00	37.549,58	942,33	26.028,99	69,32	
Jumlah		9.886,00	247.837,92	3.667,23	92.711,71		

1.6. Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Penanganan aspek social dalam pembangunan hutan alam pada saat ini sangat penting dan mendasar. Hutan merupakan sumber daya alam yang sejak lama telah menjadi bagian dari daya dukung kelangsungan hidup keanekaragaman hayati, mulai dari flora, fauna hingga komunitas local. Bagi Masyarakat local, hutan telah menjelma menjadi ruang hidup (*labensrauum*) Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan social, ekonomi, budaya bahkan religiusitasnya.

Bagi Masyarakat desa, hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting, karena sumber daya hutan memiliki manfaat dan fungsi yang sangat beragam untuk memenuhi social, ekonomi dan ekologi.

Pada tahun 2025 PT. Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan kegiatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) sebagai bahan untuk menyusun perencanaan program social yang meliputi survei social berbasis PRA, Pelaksanaan survey social dan penyusunan database social berbasis PRA serta penyusunan rencana social untuk desa-desa binaan sesuai dengan potensi biofisk serta dukungan aspek social , ekonomi dan budaya masyarakat.

1). Desa dan Pemukiman di dalam dan sekitar areal PT. WKI

Di dalam dan sekitar wilayah operasional PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia terdapat pemukiman yang terdiri dari tiga desa yakni Desa Sosepe, Desa Kelo dan Desa Sum. Keberadaan desa berkaitan erat dengan pola persebaran Masyarakat serta sejarah social dan budaya Masyarakat setempat.

Secara geografis, sebagian besar pusat pemerintahan desa berada di area PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia dan berbatasan langsung dengan area konsesi Perusahaan. Fenomena ini tidak terlepas dari latar belakang kultural Masyarakat Obi, yang pada masa lalu memiliki pola kehidupan berladang dan melaut.

Faktor lain yang mempengaruhi keberadaan Desa di sekitar dan dalam areal PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia adalah keterikatan Masyarakat dari segi kepemilikan lahan adat dan ikatan kekerabatan.

Secara administratif pemerintahan, ketiga desa tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Tabel 4. Identifikasi Desa di Sekitar Areal PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia

No.	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	Obi Timur	Sosepe	Di dalam areal, basecamp dan logpond ada di wilayah administrasi desa.
2	Obi Timur	Kelo	Memiliki wilayah di dalam areal
3	Obi Timur	Sum	Memiliki wilayah di dalam areal

Sumber : Laporan SIA PT. Wijaya Kencana Indonesia

Masyarakat di wilayah desa dan dusun sekitar PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia memiliki berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan. Kegiatan utama yang dilakukan di dalam Kawasan hutan meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu untuk keperluan subsistem, seperti pembangunan rumah dan perbaikan infrastruktur desa, serta pengumpulan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maupun dijual, seperti pala, cengkeh, coklat dan tanaman tradisonal lainnya.

2). Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di dalam dan sekitar areal PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia sebagian besar mempunyai mata pencaharian dengan pola nafkah ganda yang umumnya berusaha di bidang pertanian baik berusaha tani tanaman semusim maupun berkebun tanaman tahunan seperti cengkeh, pala, kelapa dan coklat. Cengkeh, pala dan kelapa merupakan komoditas unggulan yang dibudidayakan Masyarakat, disamping jenis tanaman pertanian semusim seperti tanaman sayuran dan buah-buahan. Menurut Statistik Kecamatan Obi Timur Tahun 2024 yang memiliki luas panen terluas adalah tanaman cabai rawit, kencur dan pisang. Selain berusaha tani kegiatan Masyarakat lainnya adalah melaut (Nelayan), pedagang, PNS, dan buruh.

Wilayah Pulau Obi cukup produktif untuk tanaman Perkebunan dengan komoditas unggulan yang terbiasa dibudidayakan Masyarakat setempat antara lain Pala, Cengkeh, dan kelapa. Produktivitas budidaya jenis tanaman tersebut umumnya cukup baik, salah satunya ditunjang oleh factor iklim dan kondisi fisik tanah yang cukup baik.

3). Sosial Budaya

Penduduk di sekitar areal PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia pada umumnya merupakan Masyarakat pendatang dari Tobelo-Galela, dan suku pendatang seperti Ternate, Tidore, Makian-Kayoa, Buton, Bugis, dan Jawa.

Adat istiadat yang masih dilakukan pada dasarnya selalu berkaitan dengan ritual keagamaan.

Adat budaya Cakalele misalnya masih sering dilakukan pada upacara-upacara perkawinan atau penyambutan tamu kehormatan. Adat budaya lainnya umumnya berkaitan dengan kegiatan sehari-hari seperti berkebun atau berladang. Adat budaya lainnya umumnya berkaitan dengan kegiatan sehari-hari seperti berkebun atau berladang. Sebelum membuka lahan biasanya melakukan ritual untuk memanjatkan doa agar diberikan panen yang melimpah, demikian pula pada saat panen diantaranya masih terdapat upacara syukuran agar hasil panennya diberikan keberkahan dari sang Pencipta.

Sosial budaya masyarakat di sekitar areal PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia merupakan potret masyarakat pesisir kepulauan yang kaya akan tradisi dan sedang mengalami transformasi sosial akibat industrialisasi. Meskipun arus modernisasi masuk melalui industri nikel, kehidupan masyarakat masih kental dengan gotong royong dan kekerabatan, khas masyarakat pesisir di Halmahera Selatan.

Adanya pembangunan industri berdampak masuknya budaya luar, yang memengaruhi pola berpakaian, gaya hidup, dan bahasa, terutama di kalangan muda.

Mayoritas Agama Masyarakat di Halmahera Selatan, termasuk Obi Timur, didominasi oleh penganut Islam, dengan sebagian kecil Kristen Protestan.

II. SISTEM SILVIKULTUR

Areal kerja PBPH-HA PT. Wijaya Kencana Indonesia merupakan areal hutan alam yang masih cukup potensial untuk diproduksi. Agar kegiatan pemanfaatannya tersebut dapat berjalan secara terus-menerus, maka perlu dilakukan Upaya pengelolaan hutan secara Lestari, yang disesuaikan dengan kondisi biofisik di areal PBPH-HA tersebut. Sistem silvikultur yang diterapkan adalah multi system silvikultur yaitu Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

Sistem Silvikultur TPTI pada hutan tanah kering adalah system silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter tertentu dan dilanjutkan dengan pembinaan hutan bekas tebangan. Mengingat bahwa fungsi hutan areal PBPH PT. Wijaya Kencana

Indonesia termasuk Kawasan HP dan HPT, maka penebangan dilakukan terhadap pohon-pohon komersial yang berdiameter setinggi dada sama dengan atau lebih 40 cm up dan 50 cm up dengan rotasi tebang (daur) selama jangka waktu 30 tahun.

Sistem Silvikultur merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan hutan yang terencana, meliputi kegiatan perencanaan, pemanenan atau penyiapan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan guna menjamin produktifitas dan kelestarian hasil hutan.

Diharapkan dengan menerapkan system Silvikultur TPTI tersebut, Upaya pengelolaan hutan alam produksi dapat diatur sedemikian rupa, sehingga dari system tersebut dapat diperoleh manfaat berupa peningkatan nilai hutan baik kuantitas maupun kualitas pada areal bekas tebangan untuk siklus berikutnya.

Uraian tahapan kegiatan TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) berdasarkan Keputusan Dirjen BPK No. P.9/VI/BPHA/2009, tanggal 21 Agustus 2009., sebagai berikut :

1. Penataan Areal Kerja (PAK)
2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)
3. Pembukaan Wilayah Hutan(PWH)
4. Pemanenan
5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan
6. Pembebasan Pohon Binaan
7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 5. Etat Luas dan Etat Volume TPTI

No.	Sistem Silvikultur	Jenis Tanaman	Jarak Tanam	Daur (Thn)	Riap (m3/thn)	Etat	
						Luas (Ha/Thn)	Vol (m3/Thn)
1	TPTI	-	-	30	1,00	889,77	46.293,79

2.1. Penataan Areal Kerja

Penataan Areal Kerja adalah membagi Kawasan tersebut ke dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil untuk memudahkan pengaturan rencana-rencana pekerjaan. Wilayah yang lebih kecil dinamakan Blok, pembagian blok ini ditujukan untuk memudahkan operasional dan pengawasan dan pemantauan asal usul kayu pemungutan hasil hutan, serta pembinaan hutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2009, penataan areal kerja dibagi menjadi 30 (tiga puluh) blok Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK-HA) yang luasnya disesuaikan dengan target tebangan tahunan yang ditetapkan.

Sedangkan penataan blok terbangun adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatur blok kerja tahunan dan petak kerja yang berguna untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan perusahaan berjalan dengan tertib dan efisien.

Rencana Penataan Areal Kerja periode tahun 2021-2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rencana Penataan Areal Kerja (PAK)

NO.	TAHUN KEGIATAN	LOKASI			
		KODE	LUAS (HA)		
			HP	HPT	JUMLAH
1	2017	I	168	810	978
		II	469	87	556
2	2018	III	352	434	786
		IV	485	424	909
3	2019	V	458	680	1.138
4	2020	VI	1.101	--	1.101
5	2021	VII	761	355	1.116
6	2022	VIII	496	546	1.042
7	2023	IX	726	308	1.034
8	2024	X	947	25	972
9	2025	XI	74	509	583
10	2026	X11	34	832	866
JUMLAH			6.071	5.010	11.081

2.2. Inventarisasi Hutan

Inventarisasi hutan merupakan kegiatan pengumpulan data tentang keadaan hutan dan lingkungannya, diperlukan untuk mendukung penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Inventarisasi hutan dilakukan untuk menaksir potensi kayu dan potensi permudaan. Penaksiran potensi kayu inventarisasi dilakukan dengan kegiatan IHMB. Inventarisasi dilakukan dengan intensitas 100% pada blok kerja tahunan dan hasilnya disajikan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC). Pada kegiatan ini dilakukan penandaan terhadap pohon yang akan ditebang dan pohon inti.

Tabel 7. Rencana Kegiatan ITSP

NO.	TAHUN KEGIATAN	LOKASI			
		KODE	LUAS (HA)		
			HP	HPT	JUMLAH
1	2017	I	168	810	978
		II	469	87	556
2	2018	III	352	434	786
		IV	485	424	909
3	2019	V	458	680	1.138
4	2020	VI	1.101	--	1.101
5	2021	VII	761	355	1.116
6	2022	VIII	496	546	1.042
7	2023	IX	726	308	1.034
8	2024	X	947	25	972
9	2025	XI	74	509	583
10	2026	X11	34	832	866

NO.	TAHUN KEGIATAN	LOKASI			
		KODE	LUAS (HA)		
			HP	HPT	JUMLAH
JUMLAH			6.071	5.010	11.081

2.3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) adalah kegiatan penyediaan prasarana untuk kegiatan produksi kayu dan kegiatan pembinaan hutan sesuai dengan kepentingannya selama periode pengelolaan hutan. Tujuan PWH adalah untuk menyiapkan jalan angkutan dan prasarana lain (jembatan, gorong-gorong, TPn dan lain-lain) dalam Upaya untuk kelancaran angkutan produksi hasil hutan darimasing-masing blok tebangan dan mempermudah pengawasan serta pembinaan hutan.

Kegiatan PWH mencakup perencanaan, penentuan trace jalan, pengukuran/pemetaan, pembuatan dan pengerasan jalan termasuk pembuatan jembatan, gorong-gorong dan parit.

Tabel 8. Rencana Kegiatan PWH

No.	Tahun Kegiatan	Kode	Luas (Ha)	Rencana Jalan (Km)		
				Utama	Cabang	Jumlah
1	2017	I	978	5,93	11,86	17,79
		II	556	3,37	6,74	10,11
2	2018	III	786	4,76	9,53	14,29
3	2019	IV	909	5,51	11,02	16,52
4	2020	V	1.138	6,90	13,79	20,69
5	2021	VI	1.101	6,67	13,34	20,01
6	2022	VII	1.116	6,76	13,52	20,29
7	2023	VIII	1.042	6,31	12,63	18,94
8	2024	IX	1.034	6,27	12,54	18,80
9	2025	X	972	5,89	11,79	17,68
10	2026	XI	583	3,62	7,25	10,87
Jumlah			10.215	62,00	124,00	185,99

2.4. Pemanenan

Pemanenan kayu bulat (Log) harus diatur sedemikian rupa agar tidak melebihi daya dukung hutannya dan menekan sekecil mungkin kerusakan tegakan tinggal akibat pemungutan hasil hutan tersebut sehingga kelestarian produksi dan peningkatan nilai tegakan untuk rotasi tebang berikutnya dapat terjamin. Beberapa prinsip yang dilakukan dalam pemanenan adalah :

- Pemanenan tidak boleh melebihi riap
- Efisien, efektif, tertib dan ramah lingkungan (RIL)
- Pada areal hutan produksi terbatas tidak dilakukan kegiatan perapihan. Perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi Lokasi pengayaan.

- 30 Tahun Etat Luas = 26 693,00 /Ha/30 Tahun

				Gedangan	Total Ditanam	Gedangan	Taklukan	Taklukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

				Bencana Demam berdarah
--	--	--	--	------------------------

No.	Tahun Kegiatan	Rencana Produksi (m3)	Rencana Pemasaran		
			Industri dalam Negeri (m3)	Lokal (m3)	Jumlah (m3)
9	2025	19.892,20	17.405,67	2.486,53	19.892,20
10	2026	17.573,03	14.996,74	2.576,29	17.573,03
Jumlah		402.572,09	378.087,82	24.484,27	

2.6. Pengadaan Bibit

Keberhasilan penanaman sangat penting tergantung kepada ketersediaan bibit secara kontinyu baik dalam hal jumlah maupun waktunya. Upaya pengadaan bibit sangat ditentukan oleh tingkat ketersediaan benih dari jenis-jenis komersial dominan dan jenis komersil lainnya yang ada.

Tabel 11. Rencana Pengadaan Bibit (2017 - 2026)

No.	Tahun RKT	Kode Blok	Kebutuhan Bibit Untuk Kegiatan (Batang)							
			Pengayaan		Reahabilitasi Kawasan Lindung		Ka-ki Jalan		Jumlah	
			Ha	Btg	Ha	Btg	Ha	Btg	Ha	Btg
1	2017	XXX	89	59.363	20	26.660	40	19.200	149	105.223
2	2018	I	135	90.045	29	38.657	40	19.200	204	147.902
3	2019	II	119	79.373	17	22.661	40	19.200	176	121.234
4	2020	III	135	90.045	24	31.992	40	19.200	199	141.237
5	2021	IV	144	96.048	27	35.991	40	19.200	211	151.239
6	2022	V	160	106.720	34	45.322	40	19.200	234	171.242.
7	2023	VI	157	104.719	33	43.989	40	19.200	230	167.908
8	2024	VII	192	128.064	74	98.642	40	19.200	306	245.906
9	2025	VIII	259	172.753	74	98.642	40	19.200	373	290.595
10	2026	IX	664	442.888	73	97.309	40	19.200	777	559.397
Jumlah			2.054	1.370.018	405	539.865	400	192.000	2.859	2.101.883

2.7. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Prinsip-prinsip yang dilakukan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman adalah :

- Memulihkan produktivitas areal kurang produktif pada blok RKT
- Menggunakan bibit jenis local unggulan setempat

Rencana penanaman pengayaan dan rehabilitasi dengan jenis unggulan setempat serta pengadaan bibit untuk secara keseluruhan pada periode Tahun 2017 -2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Rencana Penanaman (2017 - 2026)

No.	Tahun Kegiatan	Kode	Penanaman (Ha)			
			Pengayaan	Rehabilitasi	Kaki Jalan	Jumlah
1	2017	I	85	23	40	148
2	2018	II	89	20	40	149

No.	Tahun Kegiatan	Kode	Penanaman (Ha)			
			Pengayaan	Rehabilitasi	Kaki Jalan	Jumlah
3	2019	III	135	29	40	204
4	2020	IV	119	17	40	176
5	2021	V	135	24	40	199
6	2022	VI	144	27	40	211
7	2023	VII	160	34	40	234
8	2024	VIII	157	33	40	230
9	2025	IX	192	74	40	306
10	2026	X	259	74	40	373
Jumlah			1.475	355	400	2.230

Tabel 13. Rencana Pemeliharaan (2017 - 2026)

No	Tahun Kegiatan	Rencana						
		Tahap-1 (Et+2)		Tahap-2 (Et+3)		Tahap-3 (Et+4)		Jumlah (Ha)
		Kode	Luas (Ha)	Kode	Luas (Ha)	Kode	Luas (Ha)	
1	2017	XXIX	148	XXVIII	106	XXVII	139	393
2	2018	XXX	149	XXIX	148	XXVIII	106	403
3	2019	I	204	XXX	149	XXIX	148	501
4	2020	II	176	I	204	XXX	149	529
5	2021	III	199	II	176	I	204	579
6	2022	IV	211	III	199	II	176	586
7	2023	V	234	IV	211	III	199	644
8	2024	VI	230	V	234	IV	211	675
9	2025	VII	306	VI	230	V	234	770
10	2026	VIII	373	VII	306	VI	230	909
Jumlah			2.230		1.963		1.796	5.989

2.8. Pembebasan Pohon Binaan

Ada beberapa prinsip yang dilakukan dalam kegiatan pembebasan pohon binaan yaitu :

- Meningkatkan riap pohon binaan.
- Pohon binaan bisa berasal dari permudaan alam dan tanaman pengayaan.
- Pada areal hutan produksi terbatas tidak dilakukan kegiatan pembebasan pohon binaan.

Tabel 14. Rencana Pembebasan Pohon Binaan (2017 - 2026)

No	Tahun Kegiatan	Kode	Luas (Ha)	Keterangan
1	2017	-	-	
2	2018	-	-	
3	2019	-	-	
4	2020	XXIX	148	
5	2021	XXX	149	
6	2022	I	204	
7	2023	II	176	
8	2024	III	199	

No	Tahun Kegiatan	Kode	Luas (Ha)	Keterangan
9	2024	IV	211	
10	2026	V	234	
Jumlah			1.321	

III. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagai salah satu kewajiban yaitu usaha menjaga kelestarian sumber daya alam dan kesinambungan pemanfaatan hutan, dengan melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap gangguan hutan, antara lain, pencurian/penebangan liar (illegal logging), perambahan hutan, kebakaran hutan, pengendalian hama dan penyakit serta perlindungan terhadap jenis-jenis satwa dan tumbuhan alam yang dilindungi beserta habitatnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 juncto no. 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, prinsip-prinsip perlindungan hutan adalah :

- Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, hewan ternak, kebakaran hutan, daya-daya alami, serta hama dan penyakit.
- Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kegiatan perlindungan hutan pada areal PBPH-HA meliputi :

- Pengamanan areal kerja
- Kebakaran hutan
- Mencegah kerusakan hutan dari keberadaan manusia dan ternak (perambahan hutan maupun pencurian hasil hutan)
- Pengendalian hama dan penyakit.
- Daya-daya alami.

Untuk melaksanakan kegiatan perlindungan hutan di areal kerja PT. Wijaya Kencana Indonesia telah menyediakan sarana dan prasarana, tenaga pengamanan hutannya, serta SOP Perlindungan hutan; Organisasi dan SDM Dalkarhutla, serta SOP pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 15. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

No.	Jenis Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kegiatan	Volume Kegiatan	Spesifikasi	Waktu Pelaksanaan
1	Pengamanan Hutan	- Pendayagunaan Tenaga Dalkarhutla	15 Org	SMA/SLTP + Diklat	Tiap tahun
		- Pemeliharaan Batas Areal PBPH	214,89 km	Lebar 3 – 4 m	
		- Patroli Pengamanan Hutan		Sungai, Jalan, Batas	2 kali/bulan
		- Pembangunan Pos Jaga	2 unit	6 x 8 m	
		- Pengadaan SSB	2 unit	80 m all band	Tiap 5 Thn
		- Pengadaan pemadam kebakaran	2 unit	Yamato, Mobil	Tiap 5 Thn
		- Pengadaan teropong	2 Unit	Nikon	Tiap 5 Thn

No.	Jenis Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kegiatan	Volume Kegiatan	Spesifikasi	Waktu Pelaksanaan
		- Pembangunan menara kebakaran	2 unit	Tinggi 25 m	
2	Konservasi Tanah dan Air	- Penanaman Pengayaan/Rehabilitasi Areal Bekas Tebangan	Sesuai RKT	Jenis unggulan	Tiap tahun
		- Penanaman areal non hutan	205 Ha	Jenis unggulan	Tiap Tahun
		- Penanaman Kanan Kiri Jalan	40 ha/thn	Jenis unggulan	Tiap Tahun
		- Pemasangan Stasiun Penakar Curah Hujan dan Pengukur Erosi	1 Unit	Base Camp	Pengukuran Rutin
3	Pelestarian Biodiversity	- Pemasangan papan himbauan	5 buah		Tiap tahun
		- Identifikasi dan Perlindungan Biodiversity	Kawasan Lindung	Perlindungan jenis Langka, jarang, terancam	Tiap tahun
		- Penyuluhan	2 kali/thn	Peningkatan Kesadaran kepada masyarakat	Tiap tahun
		- Inventarisasi dan pengelolaan kawasan Pelestarian Plasma Nutfah	482 Ha	Sesuai juknis	Pemeliharaan
4	Pengendalian hama/ penyakit	- Pemeliharaan ruang terbuka di sekitar persemaian	0,5 Ha	Bersih dan serasah	
		- Pengadaan sprayer	3 unit	Knapsak	
5	Penyuluhan keamanan hutan	- Penyuluhan & Program Kelola Sosial	1 Paket	Terintegrasi Dengan Kegiatan Kelola sosial	

IV. KELOLA SOSIAL

Rencana pengelolaan social PT. Wijaya Kencana Indonesia adalah mengambil manfaat ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya Masyarakat sekitar hutan, Desa-desa yang berhubungan dan melakukan Kelola social dengan areal PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia adalah Desa Sosepe, Desa Kelo dan Desa Sum.

Rencana Kelola social PT. Wijaya Kencana Indonesia meliputi bidang-bidang ekonomi, kelembagaan Masyarakat, dan Pendidikan dll.

Tabel 16. Rencana Peralatan

URAIAN		Jumlah	Satuan
I. Peralatan			
1.	PWH		
	a. <i>Bulldozer</i>	2	unit
	b. <i>Motor Grader</i>	2	unit
	c. <i>Excavator</i>	2	unit
	d. <i>Dump Truck</i>	4	unit
	Jumlah		
2.	ALAT PRODUKSI		
	a. <i>Chainsaw</i>	6	unit
	b. <i>Traktor Sarad</i>	4	unit
	c. <i>Logging Truck</i>	5	unit
	d. <i>Wheel / Track Loader</i>	3	unit
	Jumlah		

URAIAN		Jumlah	Satuan
3.	ALAT TRANSPORTASI		
	a. <i>Double Cabin</i>	4	unit
	b. <i>Speedboat</i>	1	unit
	Jumlah		
II. Perencanaan			
1.	Citra Landsat	5	kali
2.	Pemeliharaan Tata Batas	214,89	km
3.	Penyusunan RKUPH	1	buah
4.	Penyusunan RKTPH	10	buah
5.	Pelaksanaan IHMB	1	kali
6.	Penataan Areal Kerja	10	kali
7.	ITSP	10	kali
8.	Sertifikasi PHPL & <i>Surveillance</i>	3	kali
III. Bangunan			
1.	Bangunan	6	unit
2.	Jalan (Utama & Cabang)	189,60	km
IV. Penanaman			
1.	Pengadaan Bibit	1.022.130	btg
2.	Penanaman	1258	ha
3.	Pemeliharaan	1258	ha

Tabel 17. Kebutuhan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan

No	Jenis Tenaga Teknis Kehutanan	Kebutuhan
1.	Ganis PH Perencanaan Hutan (GANISPH-CANHUT)	2
2.	Ganis PH Pemanenan Hutan (GANISPH-NENHUT)	2
3.	Ganis PH Pembinaan Hutan (GANISPH-BINHUT)	2
4.	Ganis PH Pengujian Kayu Bulat (GANISPH-PKBRI)	2
5.	Ganis PH Pengukuran dan Pemetaan (GANISPH-KURPET)	1
JUMLAH		9

Tabel 18. Kebutuhan Tenaga Kerja

No.	Bidang Pekerjaan	Kebutuhan Tenaga Kerja (Org)
1	Site / Camp Manajer	1
2	Bidang Perencanaan Hutan	
	a. Kabid Perencanaan Hutan	1
	b. Staf Penataan Hutan	2
	c. Staf ITSP	2
	d. Staf Kurpet	2
	e. Tenaga Bantu Perencanaan	12
3	Bidang Pembinaan Hutan	
	a. Kabid Pembinaan Hutan	1
	b. Pembebasan Pohon Binaan	1
	c. Staf Persemaian & Kebun Pangkas	2
	d. Staf Pengayaan & Rehab	2
	e. Staf Pemeliharaan Tanaman	2
	f. Tenaga Bantu Pembinaan Hutan	12
4	Bidang Produksi	
	a. Kabid Produksi	1
	b. Staf Tebang & Sarad	2
	c. Staf Ukur & Kualitas Log	2
	d. Staf Pengangkutan	6
	e. Staf Pembuatan & Pemeliharaan Jalur	5
	f. Staf Tata Usaha Kayu	2
	g. Tenaga Bantu Bidang Produksi	16
5	Bidang Teknik / Bengkel	
	a. Kabid Teknik / Bengkel	1
	b. Staf Sparepart	2
	c. Staf Bengkel	16
6	Bidang Bina Sosial & Bina Lingkungan	
	a. Kabid Bina Desa Hutan	1
	b. Staf Pelaksana RKL/RPL	1
7	Bidang Perlindungan & Pengamanan	
	a. Kabid Perlindungan & Pengamanan	1
	b. Staf Pengamanan Hutan	38
8	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
	a. Kabid Litbang	1
	b. Staf Teknis Litbang	1
9	Bidang Administrasi Umum & Keuangan Camp	
	a. Kabid Administrasi & Keuangan Camp	1

No.	Bidang Pekerjaan	Kebutuhan Tenaga Kerja (Org)
	b. Staf Tata Usaha Camp	2
	c. Staf Pengawas dan Anggaran	1
	d. Staf Logistik dan Umum	3
	e. Staf Kerumahtanggaan	4
JUMLAH		147

Tabel 19. Rencana Kegiatan Sosial

No.	Aspek/Pokok Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Volume Kegiatan	Lokasi	Biaya	Waktu Pelaksanaan
I	Peningkatan pendapatan dan tumbuhnya ekonomi masyarakat berwawasan lingkungan					
a.	Pemberdayaan Sumberdaya Ekonomi	-Pembentukan dan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Koperasi)	2 Koperasi / 10 thn	Desa Sekitar *)	Rp 240.000.000,00	2017 - 2026
		- Penyuluhan / pembinaan & pengembangan sistem pertanian menetap	2 kali / thn	Desa Sekitar *)	Rp 50.000.000,00	2017 - 2026
		- Budidaya sayuran & palawija	1 ha / desa / thn	Desa Sekitar *)	Rp 100.000.000,00	2017 - 2026
		- Pemasaran hasil pertanian	12 kali / thn	Desa Sekitar *)	Rp 50.000.000,00	2017 - 2026
		- Pengadaan bibit untuk pembangunan areal bekas ladang berupa Kaliandra, MPTS dan pisang jenis Mulu Bebe	100 bibit / thn	Areal dekat ladang	Rp 250.000.000,00	2017 - 2026
		- Penyuluhan / Pengembangan budidaya lebah madu	5 unit / desa / thn	Desa Sekitar *)	Rp 150.000.000,00	2017 - 2026
		- Praktek dan pembinaan pembuatan kompos	1 unit / desa / thn	Desa Sekitar *)	Rp 150.000.000,00	2017 - 2026
		- Kemitraan dgn masyarakat berupa penanaman palawija	1 unit / desa / thn	Desa Sekitar *)	Rp 250.000.000,00	2017 - 2026

No.	Aspek/Pokok Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Volume Kegiatan	Lokasi	Biaya	Waktu Pelaksanaan
b.	Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal/Harian	- Tenaga harian kegiatan operasional PBPH	65 orang / thn	Desa Sekitar *)	Rp 2.600.000.000,00	2017 - 2026
II	Penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi					
a.	Sarana Fisik Pertanian	- Rehabilitasi lahan pertanian	2 paket / thn	Desa Sekitar *)	Rp 100.000.000,00	2017 - 2026
		- Pengadaan sarana pertanian	2 paket / thn	Desa Sekitar *)	Rp 100.000.000,00	2017 - 2026
		- Pengadaan pupuk dan pestisida	2 paket / thn	Desa Sekitar *)	Rp 50.000.000,00	2017 - 2026
b.	Prasarana Desa	- Bantuan sarana penerangan	1 paket / desa / thn	Desa Sekitar *)	Rp 100.000.000,00	2017 - 2026
		- Perawatan jalan desa	1 km / desa / thn	Desa Sekitar *)	Rp 500.000.000,00	2017 - 2026
		- Pemeliharaan sarana ibadah	1 unit / desa / thn	Desa Sekitar *)	Rp 150.000.000,00	2017 - 2026
		- Bantuan sarana olahraga	2 paket / thn	Desa Sekitar *)	Rp 50.000.000,00	2017 - 2026
		- Bantuan sarana air bersih	1 paket / desa / thn	Desa Sekitar *)	Rp 50.000.000,00	2017 - 2026
		- Pemeliharaan prasarana pendidikan	1 paket / desa / thn	Desa Sekitar *)	Rp 50.000.000,00	2017 - 2026
III	Penciptaan kesadaran dan perilaku positif terhadap pelestarian lingkungan					
a.	Pengembangan SDM	- Beasiswa murid sekolah	2 orang / thn	Desa Sekitar *)	Rp 120.000.000,00	2017 - 2026
		- Bantuan honor guru	12 kali / thn	Desa Sekitar *)	Rp 120.000.000,00	2017 - 2026
b.	Kepedulian sosial ekonomi masyarakat	- Penelitian sosial ekonomi	1 paket / thn	Desa Sekitar *)	Rp 25.000.000,00	2017 - 2026
		- Bantuan honor tambahan tenaga medis	12 kali / thn	Camp / desa sekitar	Rp 120.000.000,00	2017 - 2026
		- Pengadaan obat-obatan	1 paket / thn	Camp	Rp 50.000.000,00	2017 - 2026
		- Pemanfaatan sarana klinik perusahaan	12 kali / thn	Camp	Rp 60.000.000,00	2017 - 2026
c.	Pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan	- Melibatkan masyarakat dalam kegiatan persemaian, reboisasi, penghijauan,	1 kali / thn	Lokasi persemaian, penanaman dan pemeliharaan	Rp 500.000.000,00	2017 - 2026

No.	Aspek/Pokok Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Volume Kegiatan	Lokasi	Biaya	Waktu Pelaksanaan
		konservasi tanah dan air				

Pada kegiatan sosial PT. Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan studi *Social Impact Assessment* (SIA) sebagaimana tercantum terdapat rekomendasi pengelolaan dan pemantauam SIA sebagai berikut :

- a. Peningkatan Realisasi Produksi
Pengoptimalan realisasi produksi mendekati target tahunan yang telah ditetapkan dalam RKUPH periode 2017 – 2026 guna peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, terbukanya peluang usaha baru, kenaikan pendapatan rumah tangga masyarakat sekitar hutan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan.
- b. Peningkatan Komunikasi dan Hubungan Sosial dengan Masyarakat
Penetapan Desa Susepe sebagai desa binaan utama dinilai sebagai langkah nyata untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi secara terarah, sehingga diharapkan dapat memperbaiki persepsi negatif yang muncul akibat ketimpangan informasi atau pembagian manfaat yang belum merata.
- c. Penguatan Program CSR dan Kelola Sosial
Penyusunan prioritas program berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat melalui metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, dukungan kegiatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), pelatihan konservasi lingkungan, serta pengembangan infrastruktur sosial seperti air bersih, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
- d. Perbaikan Sistem Dokumentasi dan Administrasi Sosial
Penambahan personel khusus yang menangani bidang administrasi sosial dan pengarsipan dokumen yang terintegrasi dengan laporan pelaksanaan RKL-RPL segera dilaksanakan agar penilaian dampak sosial lebih akurat dan berkesinambungan.
- e. Pemantauan dan Evaluasi Berkala Kegiatan Sosial
Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kelola sosial perlu dilakukan secara periodik setiap semester guna menilai efektivitas program sosial, mendeteksi dini potensi konflik. Serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan perusahaan benar-benar diterima oleh masyarakat secara adil dan merata.
- f. Manajemen dan Resolusi Konflik Sosial
Pencatatan dan pendokumentasian secara sistematis perlu dilaksanakan agar proses penanganan dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti secara transparan walaupun belum terjadi di wilayah PBPH.
- g. Penguatan Aksesibilitas dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan kolaborasi dengan masyarakat dalam pemeliharaan jalan logging, logpond, dan transportasi laut bermanfaat dalam memperlancar kegiatan produksi, serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur perusahaan.

h. Pengembangan Model Kemitraan Berbasis Desa

Pengembangan menekankan pada pembagian peran dan manfaat secara adil antara perusahaan dan warga lokal.

Hutan memiliki fungsi berkelanjutan terkait kelestarian fungsi ekonomi / produksi, kelestarian fungsi sosial, dan kelestarian fungsi lingkungan / ekologi. Hutan selain menghasilkan kayu, juga memiliki sumberdaya alam lain, berupa jasa lingkungan yang tersedia dalam areal kerja PT. Wijaya Kencana Indonesia.

Tabel 20. Penelitian dan Pengembangan

No	Jenis Penelitian	Tujuan Penelitian	Volume Kegiatan	Waktu	Lokasi / Keterangan
1	Pengamatan riap hutan alam	Pengamatan riap dengan cara membuat plot pengamatan permanen (PUP), pengamatan riap selama 10 tahun, sehingga didapatkan data riap secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan	1 kali / thn	2017-2026	Areal PUP seluas 359 Ha
2	Pengamatan kegiatan SILIN	Pengamatan terhadap tingkat keberhasilan SILIN sehingga tingkat keberhasilan semakin tinggi	1 kali / thn	2017-2026	Areal Penanaman SILIN
3	Pengamatan penerapan <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL)	Pengamatan terhadap penerapan RIL sehingga tingkat efektifitas semakin tinggi	1 kali / thn	2017-2026	Blok Tebang
4	Penelitian identifikasi jenis	Identifikasi jenis-jenis kayu yang belum dikenal dalam dunia perdagangan	1 kali / thn	2017-2026	Blok Tebang
5	Uji waktu pengunduhan benih	Penelitian waktu yang tepat untuk pengunduhan benih sehingga diperoleh benih berkualitas	4 kali / thn	2017-2026	Areal Kebun Benih seluas 554 Ha
6	Uji dampak penebangan terhadap erosi tanah dan aliran air permukaan (<i>Surface run-off</i>)	Mengetahui dampak kegiatan penebangan terhadap peningkatan erosi tanah dan aliran air permukaan	1 kali / thn	2017-2026	Blok Tebang
7	Inventarisasi plasma nutfah	Mengetahui pengaruh pengelolaan hutan terhadap keberadaan & pengembangan keanekaragaman hayati	1 kali / thn	2017-2026	Blok Tebang, KPPN seluas 482 Ha

No	Jenis Penelitian	Tujuan Penelitian	Volume Kegiatan	Waktu	Lokasi / Keterangan
8	Uji prestasi kerja	Mengetahui prestasi kerja sebagai salah satu syarat efisiensi dan efektifitas kerja	2 kali / thn	2017-2026	Blok Tebang
9	Pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan	Pemanfaatan potensi HHBK sebagai tanaman obat-obatan, sandang pangan, lebah madu, jasa lingkungan berupa wisata alam dan pengadaan air bersih	4 kali / thn	2017-2026	Areal Kawasan Lindung
10	Pengamatan keanekaragaman hayati	Mengamati dan mengumpulkan data keanekaragaman hayati yang ada di areal perusahaan	2 kali / thn	2017-2026	Areal Kawasan Lindung

Tabel 21. Potensi Jasa Lingkungan (Karbon)

NO	OBJEK	LOKASI	LUAS (Ha)	KETERANGAN
1	RAP/PAN KARBON	KAWASAN LINDUNG	11.145	
2	RAP/PAN KARBON	AREAL EFEKTIF	27.550	
JUMLAH			38.695	

Operasional PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan berbagai konsekuensi (dampak) sosial bagi masyarakat di sekitarnya, yang dapat bersifat positif maupun negatif, serta langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya hutan kayu, sebagai salah satu kegiatan utama perusahaan, berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, seperti penciptaan lapangan kerja, peluang usaha, peningkatan pendapatan, perubahan persepsi masyarakat, peningkatan aksesibilitas, serta dinamika kerjasama dan potensi konflik. Selain itu, berbagai program sosial yang dijalankan perusahaan juga berkontribusi pada dampak sosial ini.

Namun, disisi lain, kegiatan operasional perusahaan juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan masyarakat setempat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan penilaian dampak sosial yang komprehensif untuk memahami dampak-dampak tersebut secara menyeluruh. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak positif yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan, serta dampak negatif yang perlu dicegah dan ditanggulangi. Selain itu, penilaian ini juga berupaya memprediksi kecenderungan dampak di masa mendatang, sehingga langkah-langkah antisipasi dan perbaikan pengelolaan dapat dilakukan secara proaktif.

Dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perusahaan bersifat ambivalen—terdapat pandangan positif yang kuat terkait manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan, namun juga muncul sejumlah persepsi negatif yang berakar pada

masalah transparansi, keadilan distribusi, serta dampak lingkungan dan sosial yang belum sepenuhnya diatasi.

Dari sisi persepsi positif, sebagian besar masyarakat di ketiga desa menyatakan bahwa kehadiran PT Wijaya Kencana Indonesia membawa perubahan nyata dalam kehidupan ekonomi lokal. Perusahaan membuka lapangan kerja baru bagi penduduk, terutama laki-laki muda yang sebelumnya hanya mengandalkan perkebunan cengkeh dan pala. Berdasarkan data lapangan di Desa Kelo, masyarakat menilai bahwa aktivitas perusahaan telah meningkatkan sirkulasi uang di desa, karena banyak warga bekerja sebagai penebang, operator, dan buruh harian di kegiatan produksi maupun persemaian. Selain itu, kehadiran perusahaan juga memunculkan peluang ekonomi tambahan, seperti berdirinya warung makan, kios kebutuhan pokok, dan jasa angkutan hasil bumi. Salah satu informan di Desa Sum menuturkan bahwa keberadaan perusahaan "membuat kampung lebih hidup," karena ada aliran pendapatan baru yang sebelumnya tidak pernah ada, terutama bagi keluarga yang memiliki anggota bekerja di camp.

Bentuk dukungan sosial perusahaan juga memperkuat citra positif di mata masyarakat. Dalam laporan PHL, disebutkan bahwa PT Wijaya Kencana Indonesia menyalurkan dana kompensasi hasil kayu sebesar Rp8.000 per meter kubik kepada desa-desa petuanan seperti Kelo dan Susepe, serta memberikan upah kerja tambahan Rp2.000 per meter kubik bagi warga yang terlibat dalam pemuatan log dan pemasangan selang. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, pagar sekolah, dan sarana ibadah. Di Desa Sum, perusahaan juga memberikan bantuan longboat dan mesin kapal, serta turut memperbaiki akses jalan antar-desa yang sebelumnya rusak parah. Banyak warga menilai kontribusi ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang nyata dan berkelanjutan.

Namun demikian, persepsi negatif terhadap perusahaan juga muncul dan tidak bisa diabaikan. Beberapa masyarakat di Desa Kelo dan Susepe mengungkapkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi dan informasi. Menurut sejumlah warga, mekanisme pembagian dana kompensasi hasil kayu masih belum transparan. Dana yang seharusnya diterima secara merata oleh pemilik lahan petuanan, dalam praktiknya disalurkan melalui pemerintah desa tanpa pelibatan langsung masyarakat dalam proses perhitungan dan pembagian. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa sebagian manfaat hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Seorang tokoh masyarakat di Kelo menyatakan, "kami tahu ada uang hasil kayu, tapi tidak semua orang tahu berapa yang diterima desa dan berapa yang dibagi ke masyarakat."

Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan akses terhadap lahan. Warga di Desa Susepe, misalnya, menyebutkan bahwa pembukaan jalan logging dan kegiatan penebangan menyebabkan sebagian aliran sungai menjadi keruh, serta mengganggu area kebun mereka. Meskipun perusahaan melakukan kegiatan reboisasi dan pemeliharaan hutan, masyarakat merasa belum banyak dilibatkan dalam

pengawasan lingkungan. Beberapa warga juga menyoroti ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan sebagai potensi risiko jangka panjang. Mereka khawatir jika kegiatan produksi berhenti atau kontrak kerja tidak diperpanjang, maka mata pencaharian masyarakat akan kembali terpuruk seperti sebelum perusahaan beroperasi.

Persepsi negatif lainnya berkaitan dengan kesenjangan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Berdasarkan catatan lapangan di Desa Sum, sebagian warga mengaku hanya mengetahui kebijakan perusahaan melalui kepala desa atau karyawan yang sudah bekerja di camp, sementara forum komunikasi terbuka jarang dilakukan. Masyarakat berharap ada lebih banyak ruang dialog agar mereka bisa menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai penentuan batas lahan petuanan dan prioritas tenaga kerja lokal.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap PT Wijaya Kencana Indonesia bersifat kompleks dan dinamis. Di satu sisi, perusahaan dipandang sebagai aktor penting yang menggerakkan perekonomian desa, membuka akses kerja, dan memberikan kontribusi sosial melalui kompensasi hasil produksi serta pembangunan infrastruktur dasar. Di sisi lain, muncul kecemasan dan kritik terhadap aspek transparansi, pemerataan manfaat, dan dampak ekologis dari kegiatan produksi hutan.

Dengan membaca kedua sisi ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan perusahaan dan masyarakat berjalan relatif harmonis namun belum sepenuhnya partisipatif. Model kemitraan sosial yang dijalankan PT Wijaya Kencana Indonesia masih bersifat top-down, di mana inisiatif dan keputusan banyak ditentukan oleh pihak perusahaan dan perangkat desa. Agar persepsi positif masyarakat dapat dipertahankan dan diperkuat, perusahaan perlu memperluas pendekatan partisipatif, misalnya melalui forum komunikasi multi-pihak, pelatihan masyarakat dalam pengawasan hutan, serta transparansi kompensasi hasil produksi.

Pelaksanaan survei PRA dan identifikasi NKT ini juga menjadi bagian dari persyaratan penilaian dalam skema sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC), yang menekankan prinsip keberlanjutan dalam aspek ekologis maupun sosial. Kendati demikian, terdapat beberapa hal penting yang masih perlu dikembangkan oleh perusahaan untuk memperkuat sistem pengelolaan sosial secara menyeluruh. Di antaranya adalah perlunya identifikasi dan pemetaan para pemangku kepentingan (stakeholders) di seluruh area operasional yang akan dikembangkan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi tumpang tindih klaim lahan. Selain itu, pemfasilitasan penetapan batas wilayah adat desa dan marga, serta pembuatan peta wilayah ulayat masyarakat adat di dalam area izin PBPH juga menjadi langkah penting agar hak-hak masyarakat hukum adat dapat diakui secara resmi.

V. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan didasarkan pada dokumen Addendum ANDAL, RKL – RPL, serta Laporan Identifikasi HCVF (*High Conservation Value Forest*).

Tabel 22. Keberadaan NKT Keseluruhan di PT. WKI

No	Nama	Remark	Buffer	NKT	Luas (Ha)	%
1	Ake Wooi	Sempadan Sungai	50	1,4,5	255,08	0,66
2	Buffer Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	50	1,4,5	809,87	2,10
3	Buffer Hutan Lindung	Kawasan Konservasi	500	1,2	1.965,76	5,09
4	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah	Area Konservasi Perusahaan	-	1	460,55	1,19
5	Kebun Benih	Area Konservasi Perusahaan	-	1	542,83	1,41
6	Kawasan Perlindungan Satwa Liar	Area Konservasi Perusahaan	-	1	369,02	0,96
Total (Ha)					4.403,11	11,41

Tabel 23. Ancaman NKT

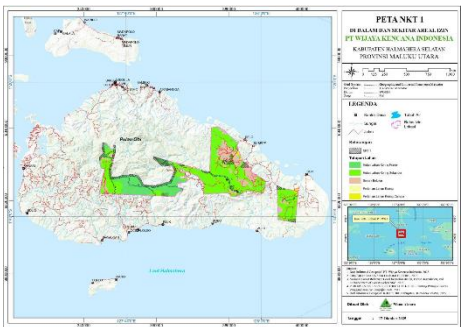
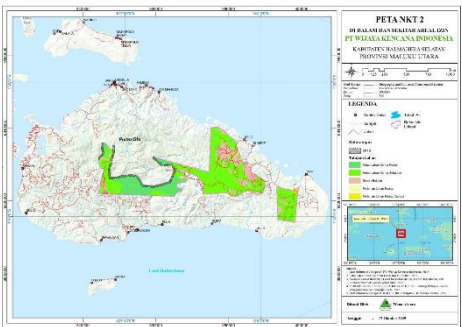
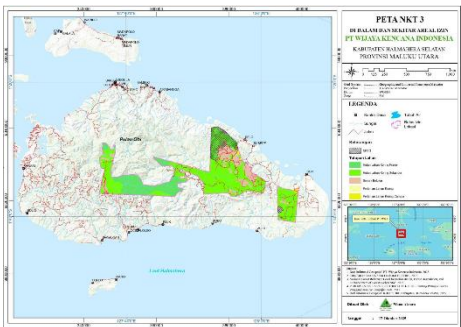
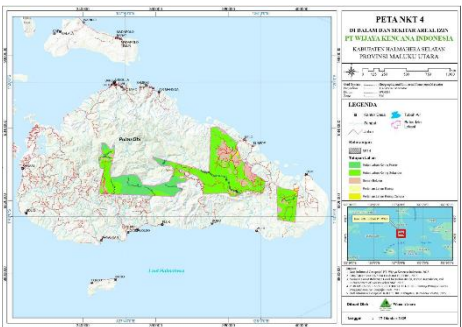
NKT	Deskripsi Singkat Kehadiran Nilai di Areal PBPH	Ancaman Utama	Tingkat Ancaman
NKT 1	Keanekaragaman Spesies : - Spesies flora yang endemik dan / atau terancam atau terancam punah	Saat Ini :	
		- Perburuan satwa liar oleh masyarakat	Sangat Tinggi
	- Spesies fauna endemik dan / atau terancam atau terancam punah - Areal Berhutan (Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder) - Sungai dan sempadannya	- Penebangan liar	Sangat Tinggi
		- Pencemaran air sungai akibat penggunaan bahan kimia dari areal perusahaan dan areal pertanian masyarakat	Sangat Tinggi
		- Penanaman tanaman eksotik	Sangat Tinggi
		- Penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya sedimentasi dan menurunnya kualitas air sungai	Sangat Tinggi
		Potensial :	
		- Berkurangnya luas habitat akibat adanya konversi lahan berupa hutan lahan kering sekunder menjadi lahan pertanian	Sangat Tinggi

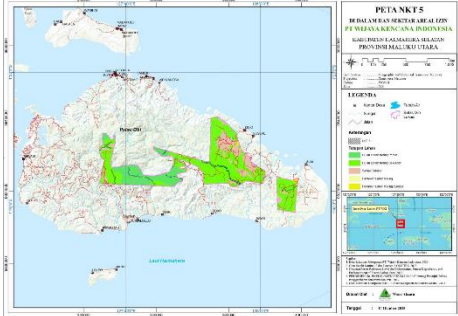
NKT	Deskripsi Singkat Kehadiran Nilai di Areal PBPH	Ancaman Utama	Tingkat Ancaman
		- Penurunan kualitas air akibat pembukaan lahan, limpasan pupuk dan pestisida, polusi lainnya yang masuk ke sungai	Sangat Tinggi
		- Pencemaran limbah rumah tangga	Tinggi
		- Kebakaran Lahan	Tinggi
NKT 2	Areal Berhutan Areal Berhutan (Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder)	Saat Ini : - Penebangan Liar	Sangat Tinggi
NKT 3	Areal Berhutan Areal Berhutan (Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder)	Saat Ini : - Penebangan Liar	Sangat Tinggi
NKT 4	Jasa Ekosistem Sungai dan Sempadannya	Saat Ini :	
		- Pencemaran air sungai akibat penggunaan bahan kimia dan aktifitas perusahaan dan lahan pertanian masyarakat	Sangat Tinggi
		- Penambangan tanpa izin oleh masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya sedimentasi dan menurunnya kualitas air sungai	Sangat Tinggi
		Potensial :	
		- Kegiatan operasional perusahaan yang mengakibatkan pendangkalan sungai pada musim hujan dan penurunan debit air sungai pada musim kemarau , dan meningkatkan erosi	Sangat Tinggi
		- Pencemaran limbah rumah tangga	Tinggi
NKT 5	Kebutuhan Masyarakat - Sungai dan Sempadannya	Saat Ini :	
		- Pencemaran air sungai akibat penggunaan bahan kimia dan aktifitas perusahaan dan lahan pertanian masyarakat	Sangat Tinggi

NKT	Deskripsi Singkat Kehadiran Nilai di Areal PBPH	Ancaman Utama	Tingkat Ancaman
		- Penebangan tanpa izin oleh masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya sedimentasi dan menurunnya kualitas air sungai	Sangat Tinggi
		- Pencemaran limbah rumah tangga	Tinggi
		- Hilangnya sumber air minum akibat air sungai mengalami pencemaran	Sangat Tinggi
NKT 6	Tidak Ditemukan	Tidak Ada	Tidak Ada
Gambut	Tidak Ditemukan	Tidak Ada	Tidak Ada

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penilaian ancaman terhadap NKT di areal PT. WKI adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara mengukur dampak relatif atas suatu kejadian dan cenderung lebih fokus pada aspek-aspek strategis dan politis dalam menghindari atau mengurangi dampak negatif atas suatu risiko. Hasil penilaian tingkat ancaman dibedakan kedalam 5 macam yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Penilaian terhadap ancaman NKT di areal PT. WKI dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu (1) Studi literatur, (2) Wawancara, (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) Pengamatan (observasi) lapangan. Penilaian terhadap ancaman di areal PT. WKI diarahkan terhadap 2 sumber yaitu internal dan eksternal, serta terhadap 2 kejadian yaitu saat ini dan potensial.

Tabel 24. Peta Keberadaan NKT di areal PT. WKI

NKT	Peta	NKT	Peta
1		2	
3		4	

NKT	Peta
5	 The map shows the island of Halmahera with various management zones highlighted in green and yellow. A legend on the right side of the map provides details on the symbols and colors used. The title of the map is 'PETA NKT 5' and it includes a scale bar and a north arrow.

NKT 1 :

Rekomendasi Pengelolaan dilakukan dengan : a. penandaan batas dan pemeliharaan tanda batas areal sempadan sungai dan areal berhutan; b. melakukan sosialisasi NKT secara internal dan eksternal; c. melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanggulangan gangguan – gangguan terhadap areal pengelolaan NKT melalui kegiatan pemasangan dan pemeliharaan tanda / plang NKT di jalur akses strategis; d. patroli secara rutin; e. melakukan survei lebih lanjut untuk memastikan status populasi spesies NKT 1; f. melakukan pemeliharaan sempadan sungai (riparian); g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk KPH dan DLH Halmahera Selatan dalam rangka penegakan hukum secara efektif dalam mengurangi kegiatan ilegal.

Rekomendasi Pemantauan dilakukan dengan : a. melakukan pemantauan tahunan populasi spesies NKT 1 di areal pengelolaan NKT; b. Mengembangkan sistem pemantauan secara periodik untuk memastikan bahwa kegiatan ilegal dapat diminimalisir; c. melakukan pemantauan secara periodik terhadap efektivitas kegiatan pencegahan, perlindungan dan penanggulangan terhadap gangguan – gangguan di areal pengelolaan NKT; d. melakukan pemantauan intensitas gangguan terhadap sempadan sungai dan areal berhutan secara periodik; e. melakukan pemantauan secara periodik kegiatan rehabilitasi dan restorasi di areal sempadan sungai; f. melakukan pemantauan secara periodik terhadap spesies RTE.

NKT 2 :

Rekomendasi pengelolaan dilakukan dengan : a. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal; b. melakukan kegiatan rehabilitasi kawasan yang terdegradasi; c. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan lindung melalui program pendidikan dan penyuluhan.

Rekomendasi pemantauan dilakukan dengan : a. memanfaatkan teknologi satelit dan drone untuk pemantauan jarak jauh; b. melakukan survei kehati secara berkala; c. meningkatkan pengawasan lapang dengan patroli rutin.

NKT 3 :

Rekomendasi pengelolaan dilakukan dengan : a. mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan; b. melakukan penelitian untuk memahami

dinamika ekosistem terancam dan mengembangkan teknologi baru untuk pengelolaan yang lebih baik.

Rekomendasi pemantauan dilakukan dengan : a. menggunakan sensor tanah dan udara untuk memantau kondisi lingkungan; b. melibatkan komunitas lokal dalam upaya pemantauan dan konservasi hutan.

NKT 4 :

Rekomendasi pengelolaan dilakukan dengan : a. melakukan penandaan batas dan pemeliharaan tanda batas areal sempadan sungai; b. melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanggulangan gangguan-gangguan terhadap areal pengelolaan NKT; c. melakukan pemeliharaan sempadan sungai; d. mengembangkan dan menerapkan SOP yang berkaitan dengan upaya meminimalisir terjadinya erosi dan menjaga kualitas air; e. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait dalam rangka mencegah, melindungi, dan menanggulangi gangguan terhadap sungai beserta sempadannya dan areal berhutan.

Rekomendasi pemantauan dilakukan dengan : a. melakukan pemantauan bersama masyarakat secara periodik terhadap kondisi fisik sungai, kualitas dan kuantitas air sungai; b. melaksanakan pemantauan secara periodik terhadap gangguan masyarakat terhadap sungai dan sempadannya serta areal berhutan; c. melakukan pemantauan erosi secara periodik; d. melakukan pemantauan secara periodik perubahan tutupan lahan dan regenerasi secara alami di areal sempadan sungai; e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SOP yang diterapkan.

NKT 5 :

Rekomendasi pengelolaan dilakukan dengan : a. pemasangan papan nama untuk berburu secara terbatas; b. mengontrol kegiatan tebang yang dilakukan oleh masyarakat; c. melakukan perlindungan terhadap NKT 5 melalui kegiatan penandaan batas yang jelas di lapang dan patroli secara rutin; d. melakukan koordinasi dengan kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mengurangi kegiatan ilegal di dalam areal.

Rekomendasi pemantauan dilakukan dengan : a. Mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring secara partisipatif untuk melacak ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat secara periodik; b. melakukan pemantauan secara periodik peran masyarakat dalam mengurangi dampak lingkungan; c. melakukan pemantauan terhadap persepsi masyarakat terkait kuantitas dan kualitas air sungai; d. melakukan pemantauan secara periodik kegiatan pemebangan pohon areal PT. WKI yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan secara subsisten.

Tabel 25. Upaya Pengelolaan Lingkungan

No	Bentuk Kawasan Lindung	Tujuan Kegiatan	Jenis Pengelolaan / Pemantauan Lingkungan	Lokasi Kegiatan	Waktu
A. Pengelolaan Kawasan Lindung					
1.	Sempadan Sungai, Rawa, dan Mata Air	- Menjaga erosi tepi sungai - Mengurangi laju erosi dan sedimentasi	Tidak merusak sempadan sungai, rawa, dan mata air	Sungai-sungai dan rawa di dalam areal kerja	Terus menerus
2.	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	Menjaga keberadaan sumber genetika jenis setempat	Pengelolaan & Pemantauan Plasma Nutfah	Areal Plasma Nutfah	1 kali / thn
3.	Rehabilitasi Kawasan Lindung	Mengembalikan kondisi Kawasan Lindung ke bentuk aslinya	Penanaman dan Pemeliharaan	Seluruh Kawasan Lindung	Setiap tahun
4.	Perlindungan Keanekaragaman Hayati Ekosistem Karst	Menjaga keberadaan Ekosistem Karst	Pengelolaan & Pemantauan Ekosistem Karst	Areal Karst	1 kali / thn
B. Fisik - Kimia					
1.	Laju Erosi dan Sedimentasi	Mengurangi laju erosi dan dampak turunannya	- Penanaman areal terbuka bekas tebanan - Penanaman areal non hutan - Perencanaan trase jalan yang tepat berdasarkan hasil survei dan pemetaan topografi - Pembuatan bangunan penguat tebing - Pembukaan tanah pada kemiringan <15% - Perbaikan teknik penyaradan	- LOA - Areal Non Hutan (205 Ha) - Lokasi jalan angkutan - Kanan kiri jalan yang rawan erosi - TPn / TPK - Jalan sarad	1-3 thn pasca penembangan (2017-2026) - Tiap tahun (keg. Rutin) - Pada waktu pembuatan trase jalan - Tiap tahun (keg. Rutin) - Pada waktu pembuatan TPn / TPK - Terus menerus
C. Biologi					
1.	Struktur dan Komposisi Tegakan	Mengurangi kerusakan tegakan tinggal	- Menerapkan sistem pembalakan	- Blok RKT	Terus menerus

No	Bentuk Kawasan Lindung	Tujuan Kegiatan	Jenis Pengelolaan / Pemantauan Lingkungan	Lokasi Kegiatan	Waktu
			berdampak rendah (RIL) - Pembuatan jalan sarad berdasarkan hasil pemetaan topografi skala operasional - Pelatihan tenaga kerja (operator) - Pembentukan divisi Kelola Lingkungan	- Blok Tebangan / Jalan Sarad	Terus menerus Tiap tahun (keg. Rutin) Tiap tahun (keg. Rutin)
2.	Satwa Liar	Mengintensifkan upaya perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi (sesuai SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022) :	- Mempertahankan keberadaan pohon pakan satwa - Monitoring dan pengawasan terhadap habitat dan populasi satwa dilindungi	- Di seluruh areal - Di tempat yang menjadi habitat satwa	Terus menerus Terus menerus
		- Menjaga keberadaan habitat satwa liar - Melindungi jenis flora dan fauna dilindungi	- Pengawasan perburuan - Pemasangan papan larangan - Penyuluhan	- Di seluruh areal - Di lokasi strategis - Di camp dan di desa terdekat	Terus menerus Terus menerus 2 kali / thn
D.	Sosekbud				
1.	Sosial Ekonomi a. Kesempatan Kerja b. Pendapatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	- Meningkatkan jumlah dan keterampilan tenaga kerja lokal - Pelaksanaan program	Desa - desa di sekitar areal IUPHHK	Tiap tahun (keg. Rutin)

VI. Hak-Hak Pekerja & Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sebagaimana sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP) yang berlaku, terkait hak – hak pekerja tercantum di dalam PP tersebut diantaranya :

- 1) Cuti Tahunan
- 2) Cuti Haid & Cuti Melahirkan/Keguguran
- 3) Cuti Sakit
- 4) Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Upah Penuh
- 5) Tunjangan Kesehatan (BPJS Kesehatan)

- 6) Pengobatan
- 7) Fasilitas Kerja
- 8) Perlengkapan K3
- 9) Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan
- 10) Fasilitas Perusahaan
- 11) Bantuan Kematian
- 12) Peningkatan Keterampilan Karyawan
- 13) Menyampaikan Keluh Kesah
- 14) Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pelecehan Seksual

Tabel 26. Target Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

No.	Target	Program	Jadwal	Keterangan
1.	Kecelakaan Nihil	Pemantauan rutin dan pengendalian kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman di tempat kerja	Rutin	Anggota P2K3
		Pemantauan rutin dan pengendalian bahaya pada alat/ mesin/ instalasi/ bahan/material berbahaya	Rutin	Anggota P2K3
		Pengendalian pekerjaan bahaya/resiko tinggi dengan izin kerja khusus	Insidentil	Anggota P2K3
		Pengendalian bahaya secara visual di tempat kerja (tanda, label, rambu, dan poster)	Berkala	Anggota P2K3
		Menyediakan sarana dan prasarana K3 termasuk Alat Pelindung Diri (APD)	Berkala	Anggota P2K3
2.	Tidak ada penyakit akibat kerja dan penyakit menular	Menyediakan sanitasi dan lingkungan kerja yang sehat ditempat kerja	Rutin	Anggota P2K3
		Menyediakan tempat kerja dan sarana tempat kerja yang nyaman bagi tenaga kerja	Rutin	Anggota P2K3
		Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja	Rutin	Anggota P2K3
3.	Memenuhi semua baku mutu dan ambang batas aspek lingkungan	Pengukuran dan pemantauan aspek-aspek dampak lingkungan operasional perusahaan secara rutin/berkala	Berkala	Anggota P2K3
		Melakukan pengelolaan aspek dampak lingkungan operasional perusahaan	Rutin	Anggota P2K3
4.	Pembinaan pengetahuan dan kesadaran K3 seluruh tenaga kerja dan pihak ketiga lainnya	Mensosialisasikan K3 sesuai dengan resiko pekerjaan dan bahaya penyakit menular kepada tenaga kerja dan keluarganya, para tamu, dan pihak ketiga lainnya	Berkala	Anggota P2K3
		Memfasilitasi pelatihan kompetensi sesuai dengan keahlian yang berkaitan dengan syarat-syarat K3 di tempat kerja	Sesuai kebutuhan	Anggota P2K3

Tabel 27. Daftar Rencana dan Realisasi Pelatihan, Kompetensi, dan Sosialisasi 2026

NO	JUDUL PELATIHAN	TIPE PELATIHAN		RENCANA PELAKSANAAN												REALISASI				KETERANGAN
		IN HOUSE	OJT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	✓/ X	LOKASI	JUMLAH PESERTA	TANGGAL	
1	Peraturan Kehutanan dan Ketenagakerjaan tentang SVLK dan Tata Usaha Kayu (COC)	✓			24												Base Camp Sosepe	16	24 Feb 26	
2	Prinsip dan Hak Dasar Pekerja, berdasarkan 9 Konvensi Buruh Inti ILO	✓			27												Base Camp Sosepe	3	4 Mar 26	
3	Pengenalan dan Pelaporan Pelecehan Seksual	✓			27												Base Camp Sosepe	3	4 Mar 26	
4	Kesetaraan Gender dan Anti Diskriminasi	✓			27												Base Camp Sosepe	3	4 Mar 26	
5	Kesehatan, Keamanan, Keselamatan Kerja (K3), Penggunaan	✓			18												Base Camp Sosepe	40	18-19 Feb 26	

NO	JUDUL PELATIHAN	TIPE PELATIHAN		RENCANA PELAKSANAAN												REALISASI				KETERANGAN
		IN HOUSE	OJT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	✓/ X	LOKASI	JUMLAH PESERTA	TANGGAL	
	APD, APAR, Tanggap Darurat, P3K																			
6	Pelatihan GANISPH		✓														Ternate	1	13 Apr 26	
7	Pelatihan DAMKARHUTLA		✓																	
8	Pelatihan Operator Alat Berat (SIO)		✓														Base Camp Sosepe	4	13-16 Apr 26	
9	Pelatihan RIL	✓														10	Base Camp Sosepe	16	02 Des 25	
10	Pelatihan K3 Umum	✓				2														

NO	JUDUL PELATIHAN	TIPE PELATIHAN		RENCANA PELAKSANAAN												REALISASI				KETERANGAN
		IN HOUSE	OJT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	✓/ X	LOKASI	JUMLAH PESERTA	TANGGAL	
11	Hukum dan Hak Adat Masyarakat - PADIATAPA (FPIC)		✓			10														
12	Identifikasi Hak Masyarakat Lokal sesuai Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat (2007)	✓				10														
13	Konvensi ILO 169 tahun 1989	✓				5														
14	Identifikasi dan Pengelolaan Situs-Situs Budaya (NKT 6)	✓				5											Base Camp Sosepe	15		
15	Sosial Impact Assessment (SIA)		✓		17												Base Camp Sosepe	10		

NO	JUDUL PELATIHAN	TIPE PELATIHAN		RENCANA PELAKSANAAN												REALISASI				KETERANGAN
		IN HOUSE	OJT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	✓/ X	LOKASI	JUMLAH PESERTA	TANGGAL	
16	Pengelolaan dan Pemantauan HCV	✓																		
17	Penanganan Sampah Organik dan Anorganik	✓			8					8							Base Camp Sosepe	32		
18	Basic Food Safety untuk di Dapur	✓			27					7							Base Camp Sosepe	5		

VII. Implementasi Standar FM/COC-FSC

Dalam visi pengelolaannya, PT. Wijaya Kencana Indonesia berkomitmen untuk mengelola kawasan hutan secara profesional agar menjadi unit usaha yang berkelanjutan sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan secara tegas menetapkan salah satu misi utamanya yaitu menerapkan pengelolaan hutan berdasarkan standar sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) untuk Forest Management dan Chain of Custody (FM/CoC), di mana hasil penilaian dan audit sertifikasi dimanfaatkan sebagai salah satu indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) bagi unit manajemen.

Unit manajemen PT. Wijaya Kencana Indonesia secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan hutan lestari dengan berpedoman pada standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan FSC melalui penerapan praktik pengelolaan terbaik (best management practices) serta pendekatan manajemen adaptif. Pendekatan ini dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan dan kegiatan operasional berdasarkan hasil evaluasi manajemen, temuan audit FSC, perkembangan regulasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengelolaan hutan.